



KPBU Piyungan Ditinjau Ulang

KPBU Piyungan...

Di sisi lain, keberhasilan desentralisasi akan membuat TPST Piyungan hanya menerima sampah residu yang jumlahnya tidak banyak.

"Kalau sudah ada desentralisasi tentu sampah yang mau diolah lewat KPBU tidak cukup, karena syaratnya Piyungan harus menerima 600 ton per hari. Semua upaya tetap kami tempuh, tetapi tetap harus ada prioritas dan kajian yang matang agar anggarannya bisa terpakai dengan optimal," jelas Beny, Senin (9/10).

Beny juga menambahkan tahapan KPBU sudah setengah jalan. Pemda DIY sudah melakukan penawaran ke sejumlah investor. "Sama investor kan sudah sampai ke tahap *sounding market*, saya sudah sampaikan kalau tahapannya sudah setengah jalan, tapi perkembangan kekinian tentu harus ditinjau ulang supaya kami bisa konsolidasi sumber daya keuangan ke depan. Karena yang dikritik dan jadi masalah itu kan bukan soal sampah saja, melainkan banyak hal," ungkapnya.

Beny berharap dua kabupaten dan kota di wilayahnya sudah menemukan skema pengolahan sampah yang tepat menjelang dimulainya desentralisasi sampah pada awal 2024. Baik Sleman, Bantul dan Kota Jogja diharapkan sudah melakukan uji coba dan evaluasi program pengolahan sampah yang dijalankan menjelang akhir tahun nanti.

Ia mengatakan, Sleman dan Bantul sudah menemukan cara pengolahan yang tepat dengan sejumlah skema sementara Kota Jogja yang juga sudah menjalankan sejumlah program belum optimal mengatasi persoalan sampah di wilayahnya sendiri. Beberapa kali tumpukan sampah

juga terpantau masih terjadi di sejumlah titik di Kota Jogja.

"Secara kasat mata di Kota Jogja sampah memang masih menumpuk di mana-mana, saya sudah bicara dengan Penjabat Wali Kota dan Sekda Kota Jogja soal rencana aksi ke depan, dan [akan] kami lihat tiga hari ke depan [rencana] aksinya seperti apa," kata Beny.

TPST Piyungan memang masih beroperasi sampai saat ini dengan sistem kuota yang diberlakukan ke setiap wilayah. Pemda DIY belum mengetahui kapan TPST Piyungan bisa dioperasikan secara penuh lantaran adanya kebijakan desentralisasi sampah yang dimulai tahun depan.

Teknologi Tepat

Pemkot Jogja masih mengkaji teknologi yang tepat untuk mengelola sampah di dua TPS3R di wilayahnya pada 2024.

Sebelumnya, Pemkot berencana membeli alat pembakar sampah atau insinerator. Rencana tersebut dibahas dalam perubahan APBD pertengahan tahun ini. Namun, usulan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jogja terkait dengan pengadaan insinerator untuk mengurangi residu sampah yang dikirim ke TPST Piyungan dari Jogja itu belum final. "Terbaru kami mengkaji kemungkinan penggunaan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF). Hasil akhirnya nanti berupa bahan bakar seperti briket, tapi itu juga masih dikaji dan dipertimbangkan bersama," jelas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Jogja, Ahmad Haryoko. Briket atau bahan bakar padat yang terbuat dari limbah yang mengandung karbon dengan nilai kalor yang tinggi ini, menurut Haryoko, dapat meningkatkan *output* pengelolaan sampah di

Jogja. "Nanti hasil akhirnya akan disalurkan ke industri, banyak industri yang tertarik khususnya pabrik semen," katanya.

Haryoko menerangkan indikator utama dalam menentukan teknologi pengelolaan sampah yang akan digunakan setidaknya meminimalkan dampak negatif dalam dimensi sosial dan maksimal dalam mantaanya. "Kajian kami terkait teknologi ini dipastikan semuanya diorientasikan agar terbaik untuk masyarakat Jogja," ungkapnya.

Kepala DLH Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, menyampaikan pengolahan sampah pada TPS3R Guwasari menggunakan teknologi manual untuk memilah sampah organik dan anorganik. Kemudian metode *komposting* dan budi daya maggot dipakai untuk mengolah sampah organik. Guna memusnahkan residu, digunakan insinerator dengan kapasitas 500 pelangan atau setara 2 ton per hari.

Sementara, TPS3R Murtigading hingga saat ini belum optimal mengolah sampah. Adapun *Intermediate Transfer Facility* (ITF) Pasar Niten masih dikerjakan tahun ini. Nantinya ITF Pasar Niten akan menggunakan teknologi mulai dari pemilahan sampai hingga pengolah sampah.

Adapun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Epihana Kristiyani, menjelaskan teknologi daur ulang akan menjadi basis utama yang diterapkan pada pengoperasian TPST Tamarmartani. *Kompos* dan *Refuse Derived Fuel* (RDF) bakal menjadi dua luaran utama dari proses pengolahan sampah di TPST Tamarmartani. (Catut Dwi Janati)

JOGJA—Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengelola sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan akan dikaji ulang.

Yusef Leon, Triyo Handoko, Stefani Yulindriani
 redaksi@harianjogja.com

- ▶ Pemda DIY sudah menawarkan KPBU ke sejumlah investor.
- ▶ Pemkot Jogja masih mengkaji teknologi yang tepat untuk mengelola sampah di dua TPS3R di wilayahnya pada 2024.

Syaratnya, Pemkot Jogja, Pemkab Bantul, dan Pemkab Sleman, sudah bisa mengelola sampahnya secara mandiri.

Sekda DIY Beny Suharsono menjelaskan Pemda DIY akan menerapkan desentralisasi sampah mulai awal 2024. Dengan demikian, pengelolaan sampah sepenuhnya ditangani pemerintah kabupaten dan kota. Meski program desentralisasi sampah dijalankan, KPBU pengolahan sampah masih tetap dijalankan. Pasalnya, Pemda DIY sudah menjalin komunikasi dengan investor dan Pemerintah Pusat.

▶ Halaman 10

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 05 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005